

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Sakti R. “Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 262.

Abdul Halim, Barkatullah. *Buku Ajar Hukum Pertambangan: Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.

Abdullah, Sulaiman. *Pengantar Ilmu Hukum Penulis*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.

Adiyanta. “Konstruksi Yuridis Penggunaan Gizjeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 360.

Ahmad, Redi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing, 2014.

———. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Halaman Hal 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ahmad, Redi, and Luthfi Marfungah. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 474.

Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Anna, Triningsih, and Nuzul Qur’aini Mardiya. “Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan

- Lembaga Negara.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 781.
- Bambang, Arwanto. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah.” *Yuridika* 31, no. 3 (2016): 361.
- Christo Viki, Lumintang. “Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 54.
- Diah Ayu, Saputri. “Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan.” *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 207.
- Dirwansyah, Sesunan, and Abdul Basit. “Pengaruh Sarana Prasarana Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai.” *Visionist* 2, no. 2 (2013): 64.
- DKK, Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif& Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Dwi, Haryadi. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Bangka Belitung: UBB Press, 2018.
- Ferine, Kiki Farida., and Juniarti. *Pelayanan SDM*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2022.
- Fitria, Fitria. “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015).
- Hajati Sri. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2018.

- Hamdan, Firmansyah, Adithya Wardhana, Mohsi, Mawardi, and Andi Hartati. *Pendidikan Ilmu Hukum, Politik Dan Pemerintah Daerah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Handoko, Tito, and MY Tiyas Tinov. “Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Lingkungan Pasca Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singigi.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2, no. 4 (2018).
- Hantoro, Novianto M. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara.” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 150.
- Hariansi Panimba, Sampebulu. “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali.” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 246.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- I Gusti Ayu Apsar, Hadi, and Komang Febrinayanti Dantes. “Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja I Gusti Ayu Apsari Hadi, Komang Febrinayanti Dantes.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 271.
- I Nyoman Gede, Remaja. *Hukum Administrasi Negara*. Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2017.

Imam Turmidzi. “Konsep Pengendalian Mutu Dan Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Bisnis Dan Dunia Pendidikan.” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 1, no. 1 (2019): 76.

Indriani, Evita A, Budi Santoso, and Irawati Irawati. “Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 873.

Iswandir. “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi.” *Jurnal Sistem Informasi*, 2021. doi:<https://doi.org/10.35968/jsi.v1i1.34>.

Jeanever Trivosa, Ratumbanua. “Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan.” *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 72.

Khusnul, Ramadhani. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bekasi: Dewangga Energi Internasional, 2023.

Lismanto, Lismanto, and Yos Johan Utama. “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 416–33. doi:10.14710/jphi.v2i3.416-433.

Margareta Nopia Merry Venita, Jarmani, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Ketut Sudiarta. “Wewenang Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) (Kajian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung).” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Mariana Claudia, Kairupan. “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.” *Lex Et Societatis* VI, no. 5 (2018): 121.
- Mhd, Taufiqurrahman. *Hukum Administrasi Negara Di Indonesia*. Literasi Nusantara, 2021.
- Muhammad Adiguna, Bimasakti. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan : (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Muhammad, Azhar. “Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 1 (2018). doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.90-102>.
- Muhammad Nur, Fatlulloh, Hayati Rahma, and Indrayati Ariyani. “Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai.” *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 2 (2019).
- Nazaruddin, Lathif, Wijaya Mustika Mega, and Mihradi R. Muhaamad. *Hukum Administrasi Negara*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan, 2021.
- Ni Ketut Tri, Srilaksmi. “Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat Ni Ketut Tri Srilaksmi.” *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 2 (2021): 5.

- Nur, Asyiah. “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 49.
- Rahyunir, Rauf. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekosentrasi, Desentralisasi, Dan Tugas Pembantunya)*. Pekanbaru: Zanaf Publishing, 2018.
- Raynaldo, Sembering. *Buku Panduan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law, 2017.
- Riawan, Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Richard A. Posner. *The Economic Approach to Law*. Vol. 53. Texas Law Review 757, 1975.
- Rudi, Ahmad, and Pratama Aditya. “Faktor Manajemen Profesional: Perencanaan, Pengorganisasian, Dan Pengendalian (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia) Rudi Ahmad¹, Aditya Pratama².” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 5 (2021): 704. doi:<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>.
- Setyo Nugroho, Wibowo, Hidayat Bambang, DEA, and Arif Johan. “Identifikasi Jenis Batuan Beku Melihat Bentuk Pola Batuan Menggunakan Metode Discrete Wavelet Transform (DWT) Dan K-Nearest Neighbor (KNN).” *EProceedings of Engineering* 4, no. 2 (2017): 1678.

Sevvy, Yossa, and Zunaidah. "Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 11, no. 4 (2013): 265.

Shesha Annisa, Desrina. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengawasan Obat Di Apotek." *University of Bengkulu Law Journal* 5 5, no. 1 (2020): 29.

Simarmata, Jorawati. "Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 348.

Sri Nur Hari, Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal*. 3, no. 3 (2020): 431.

Sulista. "Tambang Inkonvensional: Peran Masyarakat Dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang." *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 15, no. 1 (2019): 65.

Surutama, Rahmawati, and Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendikia Press, 2020.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: RajaGravindo Persada, 2018.

Syahrul, Machmud. "Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif." *Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 64.

Titik Triwulan, Titik, and Widodo Ismu Gunadi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Tri, Hayati. *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

Wahyu, Nugroho. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.

Yati, Nurhayati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *JHM* 3, no. 1 (2022): 94.

Yusri, Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.

A. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Minerba
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

C. Jurnal

- A. Sakti R. “Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 262.
- Adiyanta. “Konstruksi Yuridis Penggunaan Gizjeling Sebagai Alat Paksa Penagihan Utang Pajak.” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (2017): 360.

- Ahmad, Redi, and Luthfi Marfubah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 474.
- Anna, Triningsih, and Nuzul Qur'aini Mardiya. "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 781.
- Bambang, Arwanto. "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah." *Yuridika* 31, no. 3 (2016): 361.
- Christo Viki, Lumintang. "Aspek Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020): 54.
- Diah Ayu, Saputri. "Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan." *Uniska Law Review* 2, no. 2 (2021): 207.
- Eri, Susan. "Manajemen Sumber Daya Manusia." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 9, no. 2 (2019): 952.
- Fitria, Fitria. "Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL) Berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2009 Di Kota Jambi." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015).
- Handoko, Tito, and MY Tiyas Tinov. "Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Lingkungan Pasca Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin

(PETI) Di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singigi.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 2, no. 4 (2018).

Hantoro, Novianto M. “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara.” *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 2 (2016): 150.

Hariansi Panimba, Sampebulu. “Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali.” *Mimbar Keadilan* 12, no. 2 (2019): 246.

I Gusti Ayu Apsar, Hadi, and Komang Febrinayanti Dantes. “Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja I Gusti Ayu Apsari Hadi, Komang Febrinayanti Dantes.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 271.

Imam Turmidzi. “Konsep Pengendalian Mutu Dan Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Dunia Bisnis Dan Dunia Pendidikan.” *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar Islam*, 1, no. 1 (2019): 76.

Indriani, Evita A, Budi Santoso, and Irawati Irawati. “Penyalahgunaan Rumah Dinas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.” *Notarius* 12, no. 2 (2019): 873.

Iswandir. “Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi.” *Jurnal Sistem Informasi*, 2021. doi:<https://doi.org/10.35968/jsi.v1i1.34>.

Jeanever Trivosa, Ratumbanua. "Sanksi Hukum Akibat Tidak Melaksanakan Kewajiban Dan Mematuhi Larangan Sebagai Organisasi Kemasyarakatan." *Lex Administratum* 9, no. 3 (2021): 72.

Margareta Nopia Merry Venita, Jarmani, I Gusti Ngurah Wairocana, and I Ketut Sudiarta. "Wewenang Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) (Kajian Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).

Mariana Claudia, Kairupan. "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002." *Lex Et Societatis* VI, no. 5 (2018): 121.

Muhammad, Azhar. "Hak Menguasai Negara Atas Sumur Minyak Melalui Pendirian Mini Refinery Plant Di Kabupaten Bojonegoro." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 1 (2018). doi:<https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.90-102>.

Muhammad Nur, Fatlulloh, Hayati Rahma, and Indrayati Ariyani. "Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai." *Indonesian Journal of Conservation* 8, no. 2 (2019).

Ni Ketut Tri, Srilaksmi. "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat Ni Ketut Tri Srilaksmi." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 2 (2021): 5.

Nur, Asyiah. “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 49

Rudi, Ahmad, and Pratama Aditya. “Faktor Manajemen Profesional: Perencanaan, Pengorganisasian, Dan Pengendalian (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Sumberdaya Manusia) Rudi Ahmad¹, Aditya Pratama².” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 5 (2021): 704. doi:<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5>.

Setyo Nugroho, Wibowo, Hidayat Bambang, DEA, and Arif Johan. “Identifikasi Jenis Batuan Beku Melihat Bentuk Pola Batuan Menggunakan Metode Discrete Wavelet Transform (DWT) Dan K-Nearest Neighbor (KNN).” *EProceedings of Engineering* 4, no. 2 (2017): 1678.

Sevvy, Yossa, and Zunaidah. “Analisis Pengaruh Kemampuan Karyawan, Pembagian Tugas, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya* 11, no. 4 (2013): 265.

Shesha Annisa, Desrina. “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengawasan Obat Di Apotek.” *University of Bengkulu Law Journal* 5, no. 1 (2020): 29.

———. “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengawasan Obat

Di Apotek.” *University of Bengkulu Law Journal* 5 5, no. 1 (2020): 29.

Simarmata, Jorawati. “Politik Hukum Restrukturisasi Pembentukan Perangkat Daerah Pasca Reformasi (Sekilas Tanggapan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 4 (2016): 348.

Sri Nur Hari, Susanto. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” *Administrative Law & Governance Journal*. 3, no. 3 (2020): 431.

Sulista. “Tambang Inkonvensional: Peran Masyarakat Dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang.” *Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara* 15, no. 1 (2019): 65.

Syahrul, Machmud. “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif.” *Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 64.

Yonnawati. “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan.” *JHM* 3, no. 1 (2022): 94.

D. Internet

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/kementerian-esdm-percepat-proses-administrasi-pengalihan-inspektur-tambang-dan-inspektur-migas> diakses pada tanggal 18 Mei 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220817141635-4-364466/rapbn-jokowi-2023-rp-3041-t-alokasi-terbesar-untuk-apa?page=all> diakses pada tanggal 25 Maret 2023

<https://www.kompas.tv/nasional/359950/tambang-ilegal-di-kaki-merapi-berkas-kompas> diakses pada tanggal 27 Maret 2023

<https://radarsemarang.jawapos.com/batang/721403496/warga-tutup-paksa-galian-c-ilegal-di-sungai-jambu-batang> diakses pada tanggal 22 Maret 2023

<https://www.kompas.tv/regional/259747/puluhan-ribu-masyarakat-tanda-tangani-petisi-setop-pertambangan-andesit-di-desa-wadas> diakses pada tanggal 14 April 2023

<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/121919-dianggap-mengganggu-aktivitas-warga-ratusan-warga-desa-lahar-pati-demo-tolak-tambang-galian-c-di-desanya> diakses pada tanggal 7 April 2023

<https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/Putusan001PUUI2003.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-pamer-hasil-capaian-pembangunan-infrastruktur-selama-jokowi-menjabat> diakses pada 22 April 2023

<https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-belanja-negara-di-2024-diarahkan-untuk-psn-dan-proyek-prioritas-strategis> diakses pada tanggal 26 Mei 2023

<https://migas.esdm.go.id/post/read/siaran-pers--kementerian-esdm-percepat-proses-administrasi-pengalihan-inspektur-tambang-dan-inspektur-migas> diakses pada tanggal 26 Juni 2023

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah

LEMBAR DISPOSISI

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

Catatan	Isi Disposisi
No. Surat : 126/UN7.F1/AK/VI/2023	<i>Di Paralelkan dan Di Bereskan untuk kajian hukum. (izin, perda, dll)</i>
Tanggal : 07/06/2023	
Dari : UNDIP Fak Hukum	
No. Kode/Agenda : 396 /1688	
Perihal : permohonan Riset/ Minerba	

St. Haris

Pjh. KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA
Kepala Bidang Mineral dan Batubara

[Signature] 13/24

SUHARNO, S.T., S.Si
NIP. 19700602 199603 1 004

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

[Signature]

Prof. Rano Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

**B. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah**

